

DAMPAK PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PINRANG

The Impact of Economic Empowerment Programs on Community Welfare in Pinrang Regency

Mikdar Rezkiawan¹, Dayu Suhardi², Muhammad Hatta³
Email: mikdarrezkiawan@gmail.com¹, camarbiru80@gmail.com²,
muhammadhatta@gmail.com³

^{1,2,3}Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare,
Sulawesi Selatan Kode Pos 91131

Abstract

Economic empowerment programs serve as a strategic instrument for local governments to address limitations in capital access, skills, and business opportunities to enhance community welfare. This study aims to analyze the implementation of the economic empowerment program and evaluate its impact on the welfare level of beneficiaries in Pinrang Regency. A qualitative descriptive approach was utilized. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, documentation, and literature review. Informants were selected via purposive sampling, comprising 3 key institutional informants (from BAPPERIDA and technical agencies) and 12 supporting community informants. Data were analyzed interactively through data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of the economic empowerment program coordinated by BAPPERIDA is integrated through entrepreneurial skills training, business equipment/capital assistance, and group mentoring. The program has positively impacted the governance capacity of business operations, increased household income, fulfilled basic needs (food, clothing, shelter), and enhanced community economic independence. However, optimal impact remains constrained by limited capital allocation, lack of sustainable post-training mentoring, and intense local market competition.

Keywords: *Economic Empowerment, Community Welfare*

Abstrak

Program pemberdayaan ekonomi merupakan instrumen strategis pemerintah daerah dalam menanggulangi keterbatasan akses modal, keterampilan, dan peluang usaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi serta mengidentifikasi dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dokumentasi, dan studi pustaka. Informan ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* yang terdiri dari 3 informan kunci instansi (BAPPERIDA dan dinas teknis) serta 12 informan pendukung masyarakat. Data dianalisis secara interaktif melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi di Kabupaten Pinrang yang di orkestrasi oleh BAPPERIDA terintegrasi melalui pelatihan keterampilan wirausaha, bantuan peralatan/modal usaha, dan pendampingan kelompok. Program ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas tata kelola usaha, kenaikan pendapatan rumah tangga, terpenuhinya kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan), serta meningkatnya kemandirian ekonomi masyarakat. Namun demikian, efektivitas pencapaian dampak optimal masih terkendala oleh keterbatasan alokasi permodalan, belum berkesinambungnya pendampingan pasca-pelatihan, serta ketatnya persaingan pasar lokal.

Kata Kunci: *Pemberdayaan Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat*

PENDAHULUAN

Program pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan daerah karena kelompok usaha mikro dan rumah tangga rentan sering menghadapi keterbatasan modal, keterampilan, teknologi, dan akses pasar. Dalam perspektif pembangunan berbasis masyarakat, pemberdayaan tidak cukup dipahami sebagai pemberian bantuan, tetapi sebagai proses meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya, mengambil keputusan usaha, dan mempertahankan penghidupan secara mandiri (Endah, 2020; Putra & Sari, 2021). Tantangan tersebut juga dijumpai di Kabupaten Pinrang, salah satu kawasan strategis di Provinsi Sulawesi Selatan yang bertumpu pada sektor pertanian, perikanan, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Meskipun memiliki potensi sumber daya yang besar, sebagian masyarakat masih mengalami kerentanan ekonomi karena akses permodalan, teknologi tepat guna, keterampilan kewirausahaan, dan jaringan pemasaran belum merata. Kondisi ini menyebabkan pendapatan usaha berfluktuasi dan belum sepenuhnya menjamin stabilitas kesejahteraan keluarga.

Landasan filosofis dan yuridis pembangunan ekonomi di Indonesia menegaskan kewajiban negara untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat tersebut dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pembangunan ekonomi lokal; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang menekankan pembinaan dan pengembangan iklim usaha; serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Untuk merespons persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) bersama perangkat daerah teknis, termasuk Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Sosial, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, melaksanakan sejumlah program pemberdayaan ekonomi. Program tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi juga pada penguatan keterampilan, kapasitas usaha, dan kemandirian penerima manfaat. Orientasi ini penting karena efektivitas pemberdayaan ditentukan oleh keterpaduan bantuan produktif, peningkatan kapasitas, partisipasi masyarakat, dan pendampingan yang berkelanjutan (Azizah, 2022; Muhammad & Nurhayati, 2022).

Namun, penelitian terdahulu lebih banyak membahas pengaruh partisipasi masyarakat, efektivitas program terhadap kapasitas usaha, atau pelaksanaan pemberdayaan pada kelompok dan wilayah tertentu (Azizah, 2022; Muhammad & Nurhayati, 2022; Siregar et al., 2024). Kajian tersebut belum secara spesifik menjelaskan keterkaitan antara mekanisme pelaksanaan lintas perangkat daerah, perubahan kesejahteraan multidimensional yang dirasakan penerima, dan kendala keberlanjutan program dalam konteks Kabupaten Pinrang. Kekosongan bukti kontekstual ini membatasi pemahaman mengenai mengapa bantuan dan pelatihan dapat menghasilkan perubahan kesejahteraan pada sebagian penerima, tetapi belum mencapai dampak yang optimal. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi, mengidentifikasi perubahan kesejahteraan penerima manfaat, serta menjelaskan mekanisme dan kendala yang membentuk dampak program. Hasil penelitian diharapkan memperkuat evaluasi kebijakan pemberdayaan ekonomi daerah dengan menghubungkan proses implementasi dan pengalaman penerima manfaat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggali, menganalisis, dan menyajikan fenomena empiris pemberdayaan ekonomi secara sistematis dan mendalam. Penelitian berlokasi di kantor BAPPERIDA Kabupaten Pinrang serta beberapa wilayah persebaran penerima program di Kabupaten Pinrang.

Penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling* berdasarkan kriteria keterlibatan langsung dalam perencanaan, eksekusi kebijakan, maupun sebagai penerima program. Total informan terdiri dari 15 orang, yakni:

1. Informan Kunci (3 Orang): Pejabat/pegawai BAPPERIDA Kabupaten Pinrang (Bidang Perekonomian & SDA) dan perwakilan dinas teknis terkait.

2. Informan Pendukung (12 Orang): Masyarakat penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi di Kabupaten Pinrang yang telah menjalankan usahanya pasca-menerima bantuan.

Definisi Operasional diantaranya sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Ekonomi: Serangkaian intervensi terstruktur meliputi pelatihan kewirausahaan, penyaluran bantuan modal/peralatan, pendampingan, serta fasilitas akses pasar.
2. Pelaksanaan Program: Tahapan sistematis yang mencakup perencanaan, sosialisasi, penyaluran bantuan, pendampingan, hingga monitoring-evaluasi.
3. Kesejahteraan Masyarakat: Tingkat pemenuhan kebutuhan material dan non-material yang diukur melalui 5 indikator: peningkatan pendapatan rumah tangga, pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan), akses pendidikan-kesehatan, stabilitas ekonomi keluarga, dan kualitas hidup.
4. Dampak Program: Perubahan kondisi sosial-ekonomi yang dirasakan penerima manfaat baik berupa penguatan kapasitas wirausaha maupun kendala yang dihadapi.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) menggunakan pedoman wawancara terstruktur dan observasi di lapangan. Data sekunder dihimpun melalui dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD), data statistik BPS, dokumen BAPPERIDA, serta literatur relevan.

Analisis data menerapkan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi 4 tahapan simultan:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*): Memproses seluruh catatan lapangan, transkrip wawancara, dan dokumen pendukung.
2. Reduksi Data (*Data Reduction*): Mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menyeleksi data utama sesuai fokus penelitian.
3. Penyajian Data (*Data Display*): Menyusun narasi analitis, tabel, dan diagram kerangka kerja untuk penafsiran fenomena.
4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing*): Merumuskan kesimpulan teoretis dan praktis yang tervalidasi oleh kecukupan data

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi di Kabupaten Pinrang

BAPPERIDA Kabupaten Pinrang berperan sebagai koordinator perencanaan yang menghubungkan program antarperangkat daerah. Temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan program melibatkan BAPPERIDA, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Sosial, serta Dinas Tenaga Kerja. Keterpaduan tersebut penting karena kebutuhan penerima tidak berhenti pada bantuan sarana produksi, tetapi mencakup pelatihan, pendampingan, dan akses pasar. Dengan demikian, koordinasi lintas perangkat daerah menjadi mekanisme yang memungkinkan sumber daya program menjangkau beberapa hambatan usaha secara bersamaan. Temuan ini sejalan dengan Wijaya dan Hidayat (2023), yang menempatkan kesetaraan akses dan koordinasi pemangku kepentingan sebagai unsur penting dalam pemberdayaan ekonomi komunitas.

Secara teknis, alur pelaksanaan program menempuh tahapan sebagai berikut:

1. Perencanaan Partisipatif: Pengusulan program dilakukan dari tingkat bawah (*bottom-up*) melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa/kecamatan yang kemudian diselaraskan ke dalam RKPD oleh BAPPERIDA.
2. Sosialisasi dan Verifikasi: Penjaringan calon penerima bantuan berbasis kriteria kerentanan ekonomi dan potensi usaha.
3. Penyaluran Bantuan dan Pelatihan: Pemberian bantuan dalam bentuk peralatan kerja/usaha tepat guna serta pelatihan tata kelola keuangan dan pemasaran dasar.
4. Pendampingan dan Evaluasi: Pembinaan berkala oleh petugas lapangan instansi teknis.

"Program pemberdayaan ekonomi ini bertujuan untuk membantu masyarakat agar memiliki keterampilan dan kemampuan dalam mengembangkan usaha mereka. Pemerintah tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga pelatihan dan pendampingan agar usaha masyarakat bisa berkembang." (Hasil Wawancara Informan Kunci Instansi)

Meskipun perencanaan dan penyaluran bantuan berlangsung sistematis, pendampingan

pasca-bantuan belum dilakukan dengan frekuensi yang memadai karena keterbatasan personel dan anggaran operasional. Kondisi ini menjelaskan mengapa hasil program lebih cepat terlihat pada kepemilikan alat dan peningkatan kapasitas produksi daripada pada perluasan pasar dan keberlanjutan usaha. Bantuan fisik dapat mengurangi kendala produksi dalam jangka pendek, tetapi tanpa pembinaan lanjutan penerima menghadapi kesulitan menerapkan pembukuan, menyesuaikan strategi pemasaran, dan merespons perubahan harga. Analisis ini mendukung temuan Harini et al. (2023) bahwa pendampingan merupakan proses penting untuk menjaga keberlanjutan pemberdayaan, bukan sekadar kegiatan tambahan setelah bantuan disalurkan.

Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Penerima Program

Sebelum menerima program, sebagian besar informan menghadapi keterbatasan modal, alat produksi, dan kemampuan pembukuan. Ketiga hambatan tersebut saling memperkuat: alat manual membatasi volume produksi, keterbatasan modal menghambat pembelian bahan baku, sedangkan pencatatan yang lemah menyulitkan penerima memisahkan keuangan usaha dan rumah tangga. Akibatnya, usaha cenderung stagnan dan pendapatan hanya mencukupi konsumsi harian.

Setelah menerima intervensi, perubahan paling awal terjadi pada efisiensi produksi dan kemampuan mengelola usaha. Peralatan yang lebih memadai mempercepat proses kerja dan meningkatkan kapasitas produksi, sedangkan pelatihan membantu penerima mengatur modal serta pemasaran. Kombinasi aset produktif dan pengetahuan usaha inilah yang mendorong peningkatan pendapatan secara bertahap. Pola tersebut memperkuat hasil Muhammad dan Nurhayati (2022) bahwa program pemberdayaan lebih efektif ketika dukungan sumber daya disertai penguatan kapasitas pelaku usaha mikro. Tabel 1 menyajikan ringkasan indikator perubahan kondisi kesejahteraan masyarakat sebelum dan sesudah program pemberdayaan:

Tabel 1. Perubahan Indikator Kesejahteraan Penerima Program

Aspek	Sebelum Program	Setelah Program
Keterampilan & Pembukuan	Sangat terbatas, masih cara lama	Meningkat, sudah memahami alur modal
Kapasitas Produksi	Hanya mengandalkan alat manual	Lebih efisien dengan dukungan mesin/alat
Pendapatan Rumah Tangga	Stagnan dan sering naik turun tajam	Meningkat, meski masih dalam skala kecil–sedang
Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Cukup, tetapi mudah terganggu jika ada guncangan	Lebih stabil dan terpenuhi secara konsisten
Kemandirian Usaha	Tinggi ketergantungan pada pihak luar	Mulai mandiri, mampu mengambil keputusan bisnis sendiri

Sumber: Data Primer di olah, 2026

Dampak Program Pemberdayaan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Secara analitis, dampak program pemberdayaan ekonomi di Kabupaten Pinrang terbagi menjadi dua dimensi utama:

1. Peningkatan Kapasitas Ekonomi dan Kemandirian (*Micro-Level Impact*)

Program mendorong perubahan cara penerima mengelola usaha, dari kegiatan ekonomi yang bersifat subsisten menuju usaha yang lebih terencana. Perubahan ini terjadi karena bantuan alat menurunkan beban kerja dan biaya operasional, sementara pelatihan meningkatkan kemampuan mengatur modal dan memasarkan produk. Dengan kata lain, dampak program tidak semata-mata berasal dari nilai bantuan, tetapi dari kemampuan penerima mengubah bantuan tersebut menjadi kapasitas produksi dan keputusan usaha yang lebih baik. Temuan ini konsisten dengan Ramadhan (2021), yang menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi berkontribusi terhadap kemandirian usaha mikro melalui penguatan kapasitas pengelolaan usaha.

"Setelah ikut pelatihan dari program itu, saya jadi tahu cara mengelola usaha dengan lebih baik, seperti cara mengatur modal dan memasarkan produk... Dulu usaha saya kecil sekali karena tidak ada modal tambahan, tapi setelah dapat bantuan alat usaha dari program pemerintah, usaha saya bisa berkembang..." (Hasil Wawancara Informan Penerima Manfaat)

2. Pemenuhan Indikator Kesejahteraan Multidimensional

Peningkatan pendapatan digunakan penerima untuk memenuhi kebutuhan pangan, memperbaiki tempat tinggal, membiayai pendidikan anak, dan mengakses layanan kesehatan. Temuan ini menunjukkan bahwa dampak program melampaui perubahan pendapatan dan mencakup dimensi kualitas hidup keluarga. Hal tersebut sejalan dengan pandangan kesejahteraan multidimensional yang menilai kondisi masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan material dan nonmaterial, bukan hanya besarnya pendapatan (Ismail & Prasetyo, 2022; Miranti & Wulandari, 2022). Pendapatan yang lebih stabil juga memperkuat kemampuan rumah tangga menghadapi pengeluaran tidak terduga sehingga mengurangi kerentanan ekonomi.

Namun, besarnya dampak tidak sama bagi seluruh penerima karena dipengaruhi persaingan produk sejenis, perubahan harga bahan baku, kemampuan pemasaran, dan akses modal lanjutan. Faktor-faktor tersebut menjelaskan mengapa peningkatan produksi tidak selalu segera menghasilkan pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan. Ketika akses pasar tidak bertambah, kenaikan volume produksi justru berisiko menekan margin atau menghasilkan persediaan yang tidak terserap. Oleh sebab itu, pemasaran digital, penguatan jejaring usaha, dan pendampingan adaptif diperlukan agar kapasitas produksi dapat dikonversi menjadi penjualan dan kesejahteraan yang lebih stabil. Temuan ini memperluas kajian pemberdayaan sebelumnya dengan menunjukkan bahwa keberhasilan program dibentuk oleh hubungan antara kualitas intervensi internal dan kondisi pasar eksternal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Program pemberdayaan ekonomi di Kabupaten Pinrang dilaksanakan melalui perencanaan partisipatif, pelatihan keterampilan, penyaluran sarana produksi, dan pendampingan yang dikoordinasikan oleh BAPPERIDA bersama perangkat daerah teknis. Keterpaduan bantuan produktif dan peningkatan kapasitas menjadi mekanisme utama yang mendorong perubahan pada pengelolaan serta produktivitas usaha penerima.
2. Program memberikan dampak positif terhadap kapasitas manajerial, pendapatan rumah tangga, pemenuhan kebutuhan dasar, dan kemandirian ekonomi. Namun, keberlanjutan dampaknya bergantung pada intensitas pendampingan, akses permodalan lanjutan, kemampuan pemasaran, dan kondisi persaingan lokal. Dengan demikian, penyaluran bantuan perlu diposisikan sebagai tahap awal dari proses pemberdayaan, bukan sebagai hasil akhir program.
3. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi dengan memperjelas bahwa dampak pemberdayaan ekonomi terbentuk melalui rantai proses: koordinasi lintas perangkat daerah menghasilkan intervensi yang lebih terpadu; bantuan alat dan pelatihan meningkatkan kapasitas usaha; dan kapasitas tersebut mendorong perbaikan kesejahteraan apabila didukung pendampingan serta akses pasar. Temuan ini memperluas kajian pemberdayaan pada konteks daerah dengan menghubungkan proses implementasi, pengalaman penerima, dan kesejahteraan multidimensional dalam satu kerangka analitis.

Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah & BAPPERIDA Kabupaten Pinrang: Perlu menyusun skema pendampingan bisnis yang berkelanjutan (*continuous business coaching*) dengan melibatkan perguruan tinggi dan institusi keuangan lokal, serta memperluas fasilitasi pemasaran digital (*e-commerce*) bagi produk UMKM.
2. Bagi Instansi Terkait: Meningkatkan keharmonisan sinergi antar-OPD dalam pengawasan dan evaluasi berkala agar program bantuan tidak berhenti pada penyaluran fisik semata.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya: Disarankan melakukan penelitian kuantitatif atau *mixed-methods* dengan metode evaluasi dampak (*impact evaluation*) menggunakan kelompok kontrol untuk mengukur besarnya *net impact* program terhadap garis kemiskinan daerah secara kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, S. R., & Nugroho, H., 2023, Analisis faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi regional, *Jurnal Ekonomi Regional dan Pembangunan*, vol. 6, no. 1, hal. 55–70.
- Arikunto, S., 2022, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Ed. Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Azizah, R. N., 2022, Pengaruh partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan ekonomi terhadap pendapatan pelaku UMKM, *Jurnal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, vol. 9, no. 1, hal. 73–85.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang, 2024, *Kabupaten Pinrang Dalam Angka 2024*, BPS Kabupaten Pinrang, Pinrang.
- Endah, K., 2020, Pemberdayaan masyarakat: Menggali potensi lokal desa, *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, vol. 6, no. 1, hal. 135-143.
- Fitri, A., 2021, Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi lokal di Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai, *Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, vol. 1, no. 2, hal. 45-58.
- Harini, N., Suhariyanto, D., Indriyani, I., Novaria, N., Santoso, A., & Yuniarti, E., 2023, Pendampingan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian desa, *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, vol. 4, no. 2, hal. 363–375.
- Idrus, I., & Hatta, M., 2023, Pemberdayaan masyarakat nelayan berbasis ekonomi kreatif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Ujung Lero, Pinrang, *BEMAS: Jurnal Bermasyarakat*, vol. 3, no. 2, hal. 73-80.
- Ikram, M., 2025, *Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang Dalam Menekan Angka Pengangguran Melalui Pelatihan Kepada Masyarakat*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Parepare, Parepare.
- InfoPublik, 2025, *Bupati Pinrang Minta Pejabat Bapperida Adaptif dan Inovatif Hadapi Perubahan*, Portal Berita InfoPublik, Jakarta.
- Ismail, A., & Prasetyo, E., 2022, Multidimensional measures of community welfare: Beyond income metrics, *Jurnal Ilmiah Ekonomi & Pembangunan*, vol. 14, no. 2, hal. 183–200.
- Kholis, N., 2015, Kesejahteraan sosial di Indonesia perspektif ekonomi islam, *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, vol. 20, no. 2, hal. 243-260.
- Miranti, E., & Wulandari, A., 2022, Dimensi kesejahteraan masyarakat: kajian aspek ekonomi dan kualitas hidup, *Jurnal Pemberdayaan dan Pembangunan Sosial*, vol. 8, no. 2, hal. 118–132.
- Muhammad, A., & Nurhayati, R., 2022, Efektivitas program pemberdayaan ekonomi dalam meningkatkan kapasitas usaha mikro, *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, vol. 23, no. 1, hal. 47–62.

- Nawangsih, V. S. A., Maksin, M., & Karimah, Z., 2025, Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Bunda Mandiri Sejahtera, *Innovative: Journal of Social Science Research*, vol. 5, no. 1, hal. 112-125.
- Nazir, M., 2021, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Nugroho, S., & Putri, R. A., 2023, Indikator kesejahteraan masyarakat dalam kajian pemberdayaan ekonomi daerah, *Jurnal Pemberdayaan Sosial Ekonomi*, vol. 11, no. 1, hal. 67–82.
- Pemerintah Kabupaten Pinrang, 2023, *Sejarah Kabupaten Pinrang*, Website Resmi Pemerintah Kabupaten Pinrang, Pinrang.
- Prakoso, E., & Putri, S. F., 2021, Prinsip pemberdayaan ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan, *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis*, vol. 12, no. 4, hal. 312–327.
- Putra, M. A., & Sari, N., 2021, Strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, vol. 8, no. 2, hal. 155–173.
- Putri, A. F., & Lestari, R., 2021, Konsep kesejahteraan masyarakat: pendekatan material dan non-material, *Jurnal Pembangunan Sosial dan Ekonomi*, vol. 9, no. 2, hal. 97–112.
- Rahayu, L., & Wijayanti, S., 2021, Indikator kesejahteraan masyarakat: Studi empiris di wilayah pedesaan Indonesia, *Jurnal Pembangunan dan Ekonomi*, vol. 9, no. 3, hal. 25–39.
- Ramadhan, F., 2021, Analisis kontribusi pemberdayaan ekonomi terhadap kemandirian usaha mikro, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, vol. 10, no. 2, hal. 204–218.
- Ramadhan, M., 2021, *Metode Penelitian*, Cipta Media Nusantara, Surabaya.
- Riduwan, & Kuncoro, M., 2022, *Cara Mengembangkan Skala dan Instrumen Penelitian*, Alfabeta, Bandung.
- Sari, D. P., & Kurniawan, H., 2022, Determinan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan Indonesia, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pemberdayaan*, vol. 6, no. 1, hal. 43–59.
- Sari, S., 2024, *Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Collaborative Governance di Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Parepare, Parepare.
- Siregar, E. Z., Hasibuan, N., & Harahap, M. E. U., 2024, Model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui usaha mikro gula aren, *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat*, vol. 9, no. 1, hal. 33-47.
- Suaib, M. S., 2023, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Penerbit Adab, Indramayu.
- Sugiyono, 2024, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Suhardi, D., 2023, Analisis Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, vol. 5, no. 2, hal. 101-115.
- Wahdaniyah, S. R., Lestari, Y. S., & Sunardi, 2025, Pemberdayaan ekonomi pada perempuan melalui program berkelanjutan, *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, vol. 14, no. 3, hal. 210-225.

- Wijaya, T., & Hidayat, A., 2023, Implementasi prinsip kesetaraan dalam pemberdayaan ekonomi komunitas, *Jurnal Administrasi Pembangunan Indonesia*, vol. 14, no. 3, hal. 293–307.
- Wijayanti, S. N., 2016, Hubungan antara pusat dan daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, *Jurnal Media Hukum*, vol. 23, no. 2, hal. 186-199.
- Yulatrilaya, Y., & Yamin, A., 2025, Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan, Pendapatan dan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, vol. 8, no. 5, hal. 4980-4993.